**IZIN LOKASI – PENETAPAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 2012**

**2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG IZIN LOKASI**

**ABSTRAK :** - Bahwa Izin Pemanfaatan Tanah yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 dan sehubungan dengan pesatnya pertumbuhan kegiatan pembangunan yang dapat mengubah fungsi ruang, maka untuk mengantisipasi dan mengendalikan perubahan tersebut perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang peran berbagai pihak, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Lokasi.

* Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010.
* Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Objek dan Subjek
3. Persyaratan Pemberian Izin Lokasi
4. Tata Cara Pemberian Izin Lokasi
5. Proses Seleksi
6. Proses Pemberian Izin Lokasi
7. Perubahan Nama
8. Perpanjangan
9. Perluasan
10. Pengendalian Penguasaan Tanah
11. Penyidikan
12. Ketentuan Pidana
13. Ketentuan Peralihan
14. Ketentuan Penutup

**STATUS :** - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 2 Januari 2012

* Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

**CATATAN :** -